

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya alam membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk mengatur seluruh sektor kelautan. Salah satu persoalan besar yang berdampak pada perekonomian dan lingkungan, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah praktik *illegal fishing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PnTpg. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif melalui studi dokumen serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif guna memahami penerapan penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah ZEE tanpa SIPI. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini melalui mekanisme putusan pengadilan berhasil memberikan efek jera kepada pelaku serta berkontribusi pada upaya perlindungan sumber daya laut. Pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan adanya komitmen kuat untuk menjaga kelestarian perikanan nasional. Perlu ditingkatkan upaya sosialisasi terkait regulasi perikanan agar seluruh pihak menyadari pentingnya ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, *Illegal Fishing*

ABSTRACT

Indonesia as a maritime nation abundant in natural resource, requires a strong legal framework to regulate all sectors related to marine resources. One of the major issues impacting both the economy and the environment, particularly within the Exclusive Economic Zone (EEZ) is the practice of illegal fishing. This study aims to examine the criminal liability of perpetrators involved in illegal fishing based on Court Decision Number 32/Pid.Sus-PRK/2020/Pn Tpg. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing a normative legal approach through document studies and analysis of relevant laws and literature. The data collected were qualitatively analyzed to understand the enforcement of laws against illegal fishing practices. The findings reveal that the defendant was legally and convincingly proven guilty of operating a foreign-flagged fishing vessel within Indonesia's EEZ without possessing a Fishing Permit (SIPI). The imposition of criminal liability through court proceedings in this case succeeded in deterring offenders and contributed to the protection of marine resources. The judges considerations reflected a strong commitment to preserving national fisheries sustainability. Moving forward, efforts to disseminate information and raise awareness regarding fisheries regulations must be intensified so that all stakeholders understand the importance of compliance with applicable legal provisions.

Keywords: Criminal Responsibility, Law Enforcement, Illegal Fishing